

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Walaupun istilah otonomi daerah bukanlah hal yang baru di dengar oleh seluruh masyarakat Indonesia karena Otonomi daerah dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999, yang kemudian mengalami penyempurnaan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Halim, 2010:138).

Dana perimbangan yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat digunakan oleh daerah dalam rangka pembangunan. Kemajuan pembangunan di daerah diberbagai bidang sangat menentukan kemajuan pembangunan Negara Indonesia. Oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat, karena ekonomi rakyat tersebar di seluruh daerah. Sebab, apabila dibandingkan dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan lebih mengenal kebutuhan masyarakat di



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

daerahnya (Soekarno, 2003: 95). Kesuksesan perekonomian di daerah sangat di tentukan oleh keberhasilan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri.

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Tangkilisan, 2005:71). Sumber-sumber penerimaan daerah dalam hal ini keuangan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

Pesatnya pembangunan daerah tidak terlepas dari sumber penerimaan daerah yang merupakan alokasi dana dari pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan daerah dalam hal ini berpengaruh pada pos belanja daerah. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Secara otomatis belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah terdiri dari dua komponen utama yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Berikut adalah tabel realisasi belanja daerah Kabupaten Bone Bolango yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1: Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 s/d 2014 (dalam juta rupiah)**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Belanja Langsung</b>	147.961.883	213.634.820	212.074.553	262.125.875	282.647.762
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	200.813.119	237.574.565	270.094.398	297.946.994	365.191.870
<b>Jumlah</b>	348.775.002	451.209.385	482.168.950	560.072.869	647.839.632

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bone Bolango

Dilihat dari tabel 1.1 di atas, secara jelas bahwa belanja daerah pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Untuk membiayai belanja daerah maka pemerintah harus lebih optimal dalam mencari dan menciptakan sumber-sumber penerimaan daerah.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Menurut Halim & Khuzul (2012: 101) sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka desentralisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat (Dana Perimbangan), transfer pemerintah pusat lainnya meliputi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, dan transfer pemerintah provinsi (pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya).
- 3) Lain-lain pendapatan yang terdiri dari Hibah dan Dana Darurat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri, melaksanakannya sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2007:232), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Perolehan pendapatan asli daerah setiap daerah Kabupaten/kota berbeda-beda, dimana dapat dibandingkan berdasarkan kemampuan kemajuan industrinya dan potensi kekayaan alam. Hal itulah yang menimbulkan ketimpangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

seringkali suatu daerah ada yang memiliki tingkat potensi pendapatan asli daerah yang tinggi dan pada daerah lain ada yang masih sangat tertinggal kekayaan potensi pendapatan asli daerahnya (Rahmawati, 2010).

Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman, selain PAD kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan (Aji, 2015)

Berikut tabel perbandingan realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango.

**Tabel 1.2: Tabel Perbandingan Realisasi PAD dan Pendapatan daerah 2010 s/d 2014 (dalam juta rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)
<b>2010</b>	6.722.530	330.332.898	2,04
<b>2011</b>	15.645.915	445.257.282	3,51
<b>2012</b>	15.949.803	437.881.288	3,64
<b>2013</b>	20.749.611	541.169.321	3,83
<b>2014</b>	58.155.538	574.148.208	10,13

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dalam periode 5 tahun terakhir ini sumber pendapatan asli daerah hanya menyumbangkan sebagian kecil untuk penerimaan daerah Kabupaten Bone Bolango, hal ini menunjukkan



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

barwa Kabupaten Bone Bolango masih membutuhkan dana untuk PAD  
untuk membiayai belanja daerah.

Meurut Djalil (2014:293) Kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Keterbatasan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dan kecenderungan meningkatnya kebutuhan dana untuk membiayai fungsi pemerintahan daerah merupakan bukti bahwa daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat. tabel diatas mengharuskan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bone Bolango melalui optimalisasi PAD.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan penerimaan PAD yang semakin meningkat maka diharapkan agar pemerintah Kabupaten Bone Bolango semakin mampu untuk memperkecil ketergantungannya pada pemerintah pusat.

Mardiasmo (2004:132) mendefinisikan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini didukung juga oleh Halim & Khusufi (2012:101) yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. oleh



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

karena itu sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango yang potensial harus digali secara optimal.

**Tabel 1.3: Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 s/d 2014 (dalam juta rupiah)**

Tahun	Pajak	Retribusi	Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Jumlah
2010	1.158.033	4.410.731	0	1.153.767	6.722.530
2011	1.368.706	2.770.504	0	11.506.705	15.645.915
2012	1.972.032	1.313.861	113.701	12.550.209	15.949.803
2013	3.002.222	925.619	746.490	16.075.280	20.749.611
2014	5.193.191	729.770	419.541	51.813.036	58.155.538

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat bahwa sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 masih sangat rendah kontribusinya untuk penerimaan daerah dalam hal ini untuk menanggulangi belanja daerah, walaupun dilihat dari jumlah pendapatannya dari tahun ke tahun meningkat tetapi dilihat dari penerimaan pendapatan setiap sumber mengalami fluktuasi sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango itu menjadi kurang maksimal.

Tabel 1.3 juga menunjukkan bahwa sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama 5 (lima) tahun terakhir ini terus meningkat dan penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi sedangkan penerimaan retribusi daerah selama lima tahun terakhir ini malah terus mengalami penurunan kontribusinya terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan yang berasal dari



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih memegang peranan penting bagi sumber utama PAD.

Selain data diatas berikut ini disajikan juga data capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target PAD Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 sampai 2014.

**Tabel 1.4: Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 s/d 2014 (dalam juta rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi PAD Terhadap Target (%)
2010	13.178.009	6.722.530	51,01
2011	18.106.362	15.645.915	86,41
2012	19.280.936	15.949.803	82,72
2013	26.036.372	20.749.611	79,69
2014	43.977.484	58.155.538	132,24

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.4 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2010 sampai tahun 2013 belum memenuhi target pendapatan yang ditargetkan dan pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil untuk melampaui target PAD yang ditargetkan oleh pemerintah setempat khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bupati Bone Bolango dalam Antara news menegaskan kepada seluruh SKPD kabupaten Bone Bolango harus bisa berupaya untuk mencapai target seperti yang telah ditetapkan, sebab program pembangunan tergantung pada hal itu. Jika penerimaan pendapatan asli daerah kecil maka peluang pemerintah daerah untuk mewujudkan





This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

program pembangunan juga cukup sulit. PAD merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, beliau juga menambahkan, bahwa PAD merupakan komponen sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (ANTARAnews.com: 2012).

Jelas bahwa masalah yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango adalah belum maksimalnya pemerintah Kabupaten dalam mengelola potensi sumber daya alam dan sumber-sumber pendapatan daerah yang lainnya dalam meningkatkan keuangan daerah. Harun (2012:1) mengungkapkan bahwa terdapat dua macam cara meningkatkan PAD, yaitu pertama menaikkan tarif pajak dan retribusi, dan kedua menetapkan target PAD setiap tahun secara rasional.

Pada dasarnya penelitian yang berkenaan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) dengan judul pengaruh PAD dan DAU terhdap belanja daerah, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2011) dengan judul yang sama menunjukan hasil penelitian bahwa belanja daerah lebih dipengaruhi oleh DAU daripada PAD.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil judul penelitian "ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGI PENERIMAAN



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA DAERAH STUDI  
kasus pada Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum maksimalnya pemerintah untuk membiayai beban belanja daerah dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango
2. Jumlah penerimaan PAD yang ada terhitung masih belum optimal, maka diperlukan ketegasan dan keseriusan pemerintah kabupaten untuk mengembangkannya.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi penerimaan daerah?
2. Apakah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi penerimaan daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango?



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam

melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besaran Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi penerimaan daerah di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi penerimaan daerah terhadap Belanja Daerah (BD) di Kabupaten Bone Bolango.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan tentang pendapatan asli daerah dan belanja daerah pada suatu pemerintah daerah, juga diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi untuk penelitian sejenis maupun yang berkenaan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemikiran banding dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango terutama pihak yang berkenaan dengan pendapatan asli daerah untuk tetap berusaha mengembangkan potensi pendapatan asli daerah dengan semaksimal mungkin.